



---

## Tinjauan Politik Rencana Pemekaranprovinsi Sumatra Selatan Barat (Sumsel Barat)

Alex Nurdin<sup>1</sup>, Kun Budianto<sup>2</sup>, Hatta Azzuhri<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [alexnurdin82000@gmail.com](mailto:alexnurdin82000@gmail.com), [kunbudianto@yahoo.co.id](mailto:kunbudianto@yahoo.co.id), [hattaazzuhri@gmail.com](mailto:hattaazzuhri@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*This study aims to critically analyze the political dynamics and strategic feasibility behind the proposal to establish a New Autonomous Region (DOB) of West South Sumatra Province (Sumsel Barat). The phenomenon of regional expansion in Indonesia often becomes an arena of contestation between technocratic needs to bring public services closer to communities and the interests of local political elites in expanding their sphere of power. Primary data were obtained through in-depth interviews with key informants representing decision-making actors, including the Chairperson of the Presidium for the Expansion of West South Sumatra, a member of the Regional Representative Council (DPD RI), and officials within the South Sumatra Provincial Government. Secondary data were collected through document analysis of the CDOB proposal, data from the Central Bureau of Statistics (BPS). The findings indicate that the plan to establish West South Sumatra Province represents a strong projection of local elite power. Elite actors utilize geographical constraints where the distance from the administrative center in Palembang ranges from 317 km to 379 km to the western region as a framing instrument to legitimize the need for a new province. Economically, the region possesses significant fiscal potential from coal mining and plantation sectors; however, its fiscal independence remains overshadowed by the risk of dependence on central government transfers. Another crucial finding reveals an asymmetry in administrative readiness: of the six proposed regencies/cities, only Empat Lawang Regency has formally expressed support through a plenary session of its Regional House of Representatives (DPRD), while other regions remain at the level of verbal commitment. This study concludes that although the urgency of administrative span of control is evident, the success of this regional expansion largely depends on the lifting of the national moratorium and the ability of elites to build inclusive consensus, rather than merely pursuing the distribution of new bureaucratic positions.*

**Keywords:** Regional Expansion, Local Political Elites, West South Sumatra, Regional Autonomy, Fiscal Independence.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dinamika politik dan kelayakan strategis di balik usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Sumatera Selatan Barat (Sumsel Barat). Fenomena pemekaran wilayah di Indonesia sering kali menjadi arena kontestasi antara kebutuhan teknokratis untuk mendekatkan pelayanan publik dengan kepentingan elit politik lokal dalam memperluas ruang kekuasaan. Metode yang digunakan*

---

*dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang merepresentasikan aktor penentu, di antaranya Ketua Presidium Pemekaran Sumsel Barat, Anggota DPD RI, serta jajaran birokrasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap proposal CDOB, data Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Barat merupakan bentuk proyeksi kekuasaan elit lokal yang sangat kuat. Para aktor elit memanfaatkan hambatan geografis di mana jarak pusat pemerintahan di Palembang mencapai 317 km hingga 379 km dari wilayah barat sebagai instrumen "framing" untuk melegitimasi kebutuhan provinsi baru. Secara ekonomi, wilayah ini memiliki potensi fiskal yang signifikan dari sektor pertambangan batubara dan perkebunan, namun kemandirian fiskalnya masih dibayangi risiko ketergantungan pada dana transfer pusat. Temuan krusial lainnya menunjukkan adanya asimetri kesiapan administratif; dari enam kabupaten/kota yang diusulkan, hanya Kabupaten Empat Lawang yang telah menetapkan dukungan formal melalui sidang paripurna DPRD, sementara wilayah lain masih bersifat komitmen lisan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun urgensi rentang kendali sangat nyata, keberhasilan pemekaran ini sangat bergantung pada pencabutan moratorium nasional dan kemampuan elit dalam membangun konsensus yang inklusif, alih-alih sekadar mengejar distribusi jabatan birokrasi baru.*

**Kata Kunci:** *Pemekaran Daerah, Elit Politik Lokal, Sumatera Selatan Barat, Otonomi Daerah, Kemandirian Fiskal*

## PENDAHULUAN

Politik merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena berkaitan langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mengikat secara kolektif. Dalam pengertian klasik, politik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas kekuasaan semata, melainkan sebagai proses pengelolaan kepentingan publik melalui mekanisme institusional yang sah. Easton (1953) mendefinisikan politik sebagai the authoritative allocation of values, yaitu proses alokasi nilai secara otoritatif dalam masyarakat.

Definisi ini menegaskan bahwa politik selalu berhubungan dengan kekuasaan, legitimasi, dan distribusi sumber daya. Dalam praktik ketatanegaraan modern, pengelolaan kekuasaan tersebut dilembagakan melalui prinsip trias politika, yakni pemisahan kekuasaan ke dalam tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu institusi serta menciptakan mekanisme checks and balances guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Dengan demikian, kekuasaan politik tidak hanya terpusat pada negara sebagai entitas tunggal, tetapi didistribusikan ke berbagai lembaga sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Di antara ketiga cabang tersebut, kekuasaan eksekutif memiliki peran sentral dalam menjalankan kebijakan publik dan mengimplementasikan keputusan politik yang telah ditetapkan. Lembaga eksekutif berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari, mulai dari perumusan hingga eksekusi kebijakan pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya negara. Oleh

---

karena itu, efektivitas dan arah penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh bagaimana kewenangan eksekutif diatur, dibatasi, dan didistribusikan dalam struktur pemerintahan.

Perubahan sistem pemerintahan dari pola dekonsentrasi menuju desentralisasi mendorong pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah, yaitu pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta mempercepat pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan kapasitas pemerintahan daerah, penyalahgunaan kekuasaan oleh elite lokal, serta disparitas pembangunan antarwilayah yang masih nyata dalam praktiknya (Iwan Kurniawan et al, 2024).

Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, yang seharusnya dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Di samping itu, upaya pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan salah satu bentuk implementasi desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal. Meskipun demikian, pemekaran wilayah juga menimbulkan tantangan administratif dan fiskal, sehingga perlu evaluasi kebijakan yang matang untuk menjamin bahwa pembentukan DOB benar-benar mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Genita Permata Sari et al, 2024).

Melalui desentralisasi, pengambilan keputusan dan kebijakan ditempatkan lebih dekat dengan masyarakat lokal, di mana pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan strategi pembangunan dengan potensi dan kebutuhan di wilayahnya. Dalam konteks ini, desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat mencegah konsentrasi kekuasaan di tingkat pusat serta mempercepat proses pembangunan lokal namun, tantangan pengawasan, kapasitas birokrasi, dan ketimpangan sumber daya menjadi faktor penting yang harus diatasi agar tujuan desentralisasi dapat tercapai secara optimal (Abdul Rahman Sabara, 2022).

Pemekaran wilayah merupakan proses pemecahan suatu daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, menjadi satuan pemerintahan baru. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan batasan minimal satuan wilayah dalam pelaksanaan pemekaran daerah sebagai bentuk penjaminan kelayakan daerah otonom baru. Pembentukan provinsi baru sekurang-kurangnya harus terdiri atas lima kabupaten/kota, sementara pembentukan kabupaten baru minimal terdiri atas lima kecamatan, dan pembentukan kota baru sekurang-kurangnya memiliki empat kecamatan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelayakan administratif, kapasitas pemerintahan, serta keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

---

Selain persyaratan kewilayahan, proses pemekaran daerah juga harus melalui prosedur dan pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemekaran daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan desentralisasi yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan lokal kepada masyarakat (Riyadi, 2020).

Provinsi Sumatra selatan secara geografis salah satu provinsi yang cukup luas di pulau Sumatra. Sumatra Selatan sendiri terdiri dari 17 Kabupaten/kota. Jarak yang terbentang antar kabupatennya cukup luas, kabupaten terluas Provinsi Sumatra selatan ini yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir yakni luas wilayah 17.071,33 Km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah yang paling kecil luasnya yakni Kota Palembang sekitar 352,51 Km<sup>2</sup> (BPS Provinsi Sumsel 2025).

Sumatra Selatan salah satu provinsi yang sudah pernah mengalami pemekaran, berdasarkan beberapa sumber data yang diperoleh Sumatra Selatan sudah tiga kali mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran pertama terjadi pada 18 Maret 1964 yakni Provinsi Lampung, kedua pada 18 November 1968 yakni Provinsi Bengkulu, dan yang terakhir pada 14 Desember 2000 yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketiga provinsi ini resmi lepas dari Provinsi induk yakni Sumatra Selatan dan menjadi daerah otonom baru. Saat ini Sumatra Selatan Kembali mencuat isu pemekaran Provinsi yang mana cikal bakal Provinsi baru ini ialah Sumatra Selatan Barat.

Provinsi Sumatra Selatan Barat merupakan usulan pemekaran dari Provinsi Sumatra Selatan yang mencakup delapan kabupaten/kota, yaitu Lahat, Empat Lawang, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas, Musi Rawas Utara (Muratara), Pagar Alam, dan Lubuk Linggau. Usulan pemekaran ini kembali mengemuka pada 2025 melalui usulan Anggota DPD RI Jialyka Maharani dalam finalisasi Daftar Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (IDN Times Sumsel, 2025).

Dorongan pemekaran Sumsel Barat dilatarbelakangi beberapa faktor. Pertama, luasnya wilayah administrasi Provinsi Sumatra Selatan membuat pelayanan publik daerah barat relative kurang optimal (Fitria & Darmawan, 2022). Kedua, kesenjangan Pembangunan antara wilayah timur yang terkonsentrasi di Palembang dan sekitarnya dan wilayah barat menimbulkan tuntutan pemerataan (Ananda, 2021). Ketiga, identitas kultural masyarakat Basemah, Semendeh, dan Lematang yang memiliki karakteristik sosial budaya tersendiri memperkuat argumen perlunya otonomi provinsi baru sebagai Upaya pelestarian budaya lokal (Yuliani, 2023).

Namun, pemekaran provinsi tidak terlepas dari tantangan, kajian badan penelitian dan pengembangan Kementerian dalam negeri (2020) menunjukkan bahwa tidak semua pemekaran daerah berhasil meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara signifikan. Sering kali, pemekaran menimbulkan beban fisik baru dan memunculkan konflik kepentingan elite politik (Sitomorang, 2020). Karena itu,

penting menelaah secara kritis pemekaran Provinsi Sumsel Barat bukan hanya dari aspek admistartif, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam al-qur'an, kekuasaan dan kewenangan yang menyangkut banyak orang dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap amanah wajib disampaikan kepada pihak yang berhak serta setiap keputusan harus ditetapkan secara adil (QS. An-Nisa [4]: 58) yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Konteks ayat ini menunjukkan Pemekaran wilayah adalah Amanah karena menyangkut banyak orang, mengingat kebijakan pemekaran tidak hanya berdampak pada pembentukan struktur pemerintahan baru, tetapi juga menyangkut distribusi kewenangan, alokasi anggaran, dan pembukaan ruang kekuasaan politik.

Oleh karena itu, pemekaran wilayah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pemenuhan aspirasi administratif atau pembangunan, melainkan perlu dikaji secara kritis untuk memastikan bahwa proses dan tujuan yang melatarbelakanginya benar-benar berorientasi pada kepentingan publik, bukan didominasi oleh motif kekuasaan atau kepentingan tersembunyi elite politik. Pemekaran diusulkan untuk pemerataan pembangunan, otonomi yang lebih besar, dan pengelolaan potensi ekonomi seperti sumber daya alam yang kurang tergarap. Dukungan politik dari DPRD dan DPD menekankan identitas budaya serta sejarah lokal, meskipun tantangan moratorium memerlukan rekomendasi pusat. Pembagian tanggung jawab dan kapasitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa hubungan administratif yang jelas merupakan salah satu prasyarat efektifnya desentralisasi dan otonomi daerah (Kun Budianto & Badarudin Azarkasyi, 2024).

Agus Dwiyanto (2011) dalam kajiannya tentang reformasi birokrasi menekankan bahwa kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi pemekaran sangat tergantung pada kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks pemekaran Sumatera Selatan Barat, dinamika birokrasi regional menjadi penting karena struktur pemerintahan baru berpotensi menciptakan posisi birokrat administratif dan politik yang baru yang sekaligus dapat membuka ruang bagi elite lokal untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya (Dwiyanto, 2011). Dalam perspektif ini, pemekaran bukan hanya urusan administratif tetapi juga bagian dari dinamika birokrasi dan politik lokal

Elite politik lokal memanfaatkan isu ketimpangan, pembangunan dan pelayanan publik sebagai legitimasi normatif, sementara pada saat yang sama memperjuangkan kepentingan kekuasaan dan posisi strategis (Haris, 2005).

---

Fenomena serupa juga ditemukan dalam berbagai studi pemekaran daerah di Indonesia, termasuk di Papua, yang menunjukkan bahwa motivasi elite politik lebih dominan dibandingkan aspirasi masyarakat luas (Muksin et al, 2021).

Pemekaran provinsi dalam konteks ini tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai arena kontestasi kekuasaan dan kepentingan. Dan kenapa nama provinsi baru ini Sumatra Selatan Barat? Kenapa tidak berganti nama lain, seperti Provinsi yang sudah menjadi daerah otonom Baru yang sudah resmi lepas dari sumsel. Karena jika melihat dari namanya akan menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat "Sumatra Selatan Barat", apakah ini bagian dari strategi para aktor politik lokal. Analisis tinjauan politik diperlukan untuk mengungkap bagaimana aktor-aktor politik lokal membingkai isu pemekaran ini, dan bagaimana narasi yang dibangun untuk mempengaruhi persepsi publik dan kebijakan pemerintah pusat. Tinjauan politik rencana pemekaran Sumsel Barat penting untuk memahami dinamika antara aspirasi lokal, kebijakan pusat, dan implikasi fiskal di tengah moratorium. Penelitian ini dapat berkontribusi pada kajian Daerah Otonom Baru nasional yang mencapai usulan provinsi/kabupaten/kota pada 2026.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika politik, aktor, kepentingan, serta relasi kekuasaan yang melatarbelakangi pemekaran Provinsi Sumatra Selatan Barat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, motif, dan strategi elite politik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dengan pendekatan kualitatif ini dapat menggali lebih dalam makna, narasi, strategi retorik, dan konteks sosial politik (Moleong, 2019 dan Creswell, 2018). Melalui metode kualitatif deskriptif ini memungkinkan peneliti dapat memahami bagaimana setiap aktor membingkai narasi Pemekaran secara berbeda. penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemaknaan fenomena sosial yang kompleks melalui perspektif aktor yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk mengkaji pemekaran daerah sebagai fenomena politik yang sarat kepentingan elite. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatra Selatan sebagai wilayah induk dan beberapa wilayah inti yang bakal tergabung dalam CDOB Sumsel Barat ini. Sumber data dalam penelitian, pertama wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci seperti Ketua Presidium Pemekaran Sumsel Barat, Anggota DPD RI Sumatra Selatan, Pemprov Sumatra Selatan yakni Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, juga Toko Masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Tinjauan Politik Rencana Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Barat*

Dalam melihat rencana pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Barat (Sumsel Barat), pendekatan politik menjadi penting untuk digunakan, mengingat proses ini tidak dapat dilepaskan dari peran aktor dan kepentingan yang terlibat. Pemekaran pada dasarnya bukan hanya persoalan pembentukan wilayah administratif baru,

---

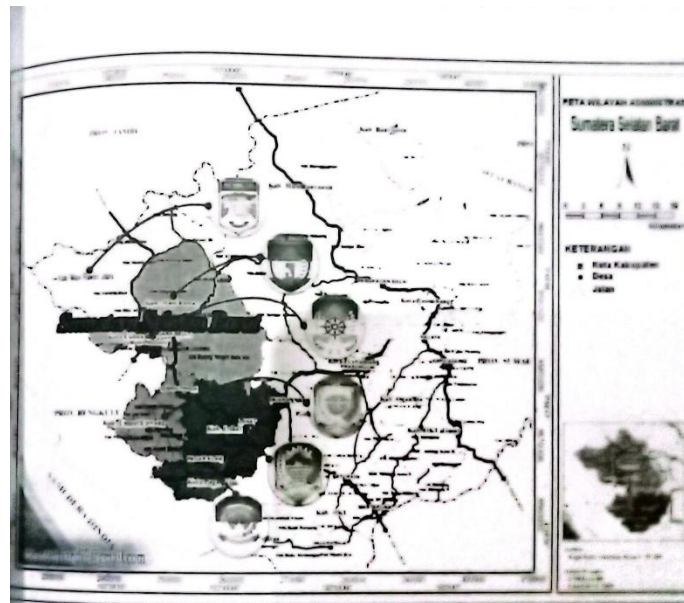
tetapi juga mencakup bagaimana kekuasaan didistribusikan dan dinegosiasikan di tingkat lokal.

Pada tinjauan politik terhadap rencana pemekaran provinsi sumsel barat dengan pendekatan teori desentralisasi dan otonomi daerah, yang mana melalui pendekatan teori ini penulis akan melihat tinjauan politik rencana pemekaran Sumsel Barat penyebab-penyebab terjadinya gerakan presidium ini ingin melakukan pemekaran Provinsi Sumsel Barat ini. Yang mana jika kita melihat memang Provinsi Sumatera Selatan ini cukup luas secara geografis dan wilayah barat ini relative terjadi ketimpangan jarak admistaratif, dari luas wilayah ini memang perlu adanya untuk dilakuka pemekaran. Rencana pemekaran ini perlu adanya persetujuan dan dukungan dari masyarakat, dalam temuan penelitian ini masyarakat setuju untuk dilakukan pemekaran.

Setelah penulis melakukan penelitian dan wawancara mengenai wacana pemekaran Provinsi Sumsel Barat, terlihat bahwa wacana pemekaran ini berkembang melalui peran aktif kelompok presidium sebagai aktor utama yang mendorong isu tersebut. Mereka tidak hanya mengajukan usulan secara formal, tetapi juga membangun narasi publik yang menekankan adanya ketimpangan pembangunan dan kebutuhan peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan bagian barat. Narasi ini kemudian menjadi dasar untuk memperoleh dukungan, baik dari masyarakat maupun dari aktor politik lainnya.

Penulis melihat berdasarkan pendekatan teori desentralisasi dan otonomi daerah, narasi ketimpangan pembangunan ini memang memiliki dasar empiris, namun dalam konteks politik, narasi tersebut juga berfungsi sebagai alat legitimasi. Artinya, isu pembangunan tidak hanya diposisikan sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat posisi tawar dalam mendorong pemekaran. Di titik ini, terlihat bahwa ada proses framing yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu agar pemekaran dipahami sebagai kebutuhan yang mendesak.

"Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru Provinsi Sumatera Selatan Barat (Sumsel Barat) pada hakikatnya adalah upaya menciptakan pemerintah yang lebih efektif, bersih dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru Sumsel Barat adalah untuk meningkatkan pelayanan public (public service) kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali tata kelola pemerintahan dalam rangka peningkatan pengembangan untuk mengantisipasi perubahan serta peluang pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang lebih baik" (wawancara dengan ketua presidium pemekaran sumsel barat, 14 April 2026).

**Gambar 1 Peta CDOB Sumsel Barat**

*Sumber: Proposal CDOB Sumsel Barat*

Di sisi lain, hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dari Biro Hukum dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, menunjukkan adanya sikap yang lebih hati-hati. Pemerintah provinsi tidak secara langsung menolak, tetapi menjamin pentingnya menyediakan syarat administratif, teknis, dan fiskal sebagaimana diatur dalam regulasi. Penekanan ini menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan rasional yang berkaitan dengan kesiapan daerah serta dampak yang mungkin timbul setelah pemekaran.

"Belum ada usulan resmi ke kementerian melalui Gubernur. Biasanya pembentukan itu ada tim Presidium. Presidium inilah yang bertugas melengkapi persyaratan seperti luas wilayah, jumlah penduduk, serta syarat administratif lainnya. Persyaratan ini kemudian harus mendapat persetujuan dari Bupati dan DPRD Kabupaten/Kota terkait, baru kemudian dibawa ke tingkat Provinsi untuk disetujui Gubernur dan DPRD Provinsi. Setelah itu baru diajukan ke kementerian. Sejauh ini, prosesnya belum sampai ke tahap itu." (Wawancara Biro Pemerintahan dan Otonomi Dearah Provinsi Sumsel, 21 April 2026)

Penulis menganalisis dalam perspektif politik, sikap hati-hati tersebut tidak bisa dilepaskan dari posisi pemerintah provinsi sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang sudah mapan. Pemekaran wilayah secara tidak langsung akan berdampak pada kewenangan distribusi, sumber daya, dan bahkan pengaruh politik. Oleh karena itu, respons yang cenderung normatif dan administratif sebenarnya juga mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas struktur yang ada.

Selain itu, keterlibatan aktor lain seperti anggota DPD RI dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga menunjukkan bahwa isu pemekaran ini telah masuk ke dalam ruang politik yang lebih luas. Dukungan maupun sikap yang ditunjukkan oleh aktor-aktor tersebut tidak terlepas dari kalkulasi politik masing-masing, baik yang berkaitan dengan basis konstituen, kepentingan elektoral, maupun posisi mereka dalam struktur kekuasaan.

---

Penulis melihat kondisi ini bahwa proses pemekaran merupakan hasil interaksi antar elite yang memiliki kepentingan yang tidak selalu sama. Elit lokal di wilayah yang mengusulkan cenderung mendorong pemekaran sebagai upaya memperluas ruang kekuasaan dan meningkatkan representasi politik. Sementara itu, elite di tingkat provinsi lebih mempertimbangkan memaksakan pemekaran terhadap kedaulatan kekuasaan yang sudah terbentuk. Menariknya, dari hasil penelitian juga terlihat bahwa tidak semua kepentingan tersebut muncul secara terbuka. Sebagian besar disampaikan melalui bahasa yang lebih normatif, seperti pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kepentingan politik akhirnya dibungkus dalam narasi yang lebih dapat diterima secara publik.

Jika ditarik lebih jauh, dinamika pemekaran Provinsi Sumatera Selatan juga dapat dibaca dari arah kebijakan yang sedang dibentuk oleh para aktor yang terlibat. Dalam konteks ini, pemekaran tidak hanya berhenti pada wacana pembentukan wilayah baru, namun sudah mulai mengarah pada bagaimana desain pemerintahan dan kewenangan distribusi akan terbentuk di masa depan. Berdasarkan temuan di lapangan, terlihat bahwa dorongan pemekaran tidak hanya berbicara tentang pemerataan pembangunan, tetapi juga tentang bagaimana wilayah baru nantinya memiliki kapasitas untuk mengelola kebijakan secara mandiri. Hal ini terlihat dari argumen yang dibangun oleh kelompok presidium yang tidak hanya menyoroti ketertinggalan wilayah, tetapi juga potensi daerah yang dianggap mampu menjadi dasar pembangunan jika dikelola secara lebih otonom.

Pada titik ini, arah kebijakan yang diinginkan sebenarnya mengarah pada desentralisasi yang lebih dalam di tingkat regional. Namun, jika dijelaskan lebih kritis, hal tersebut juga membuka ruang baru bagi elite lokal untuk mengendalikan proses penyusunan kebijakan. Dengan kata lain, pemekaran menjadi pintu masuk untuk membangun pusat-pusat kekuasaan baru yang memiliki otonomi dalam menentukan prioritas pembangunan. Selain arah kebijakan, aspek yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian terhadap sumber daya ekonomi dan sumber daya alam. Wilayah yang diusulkan adalah bagian dari Provinsi Sumsel Barat yang memiliki potensi sumber daya yang cukup besar, baik dari sektor pertambangan, perkebunan, maupun sumber daya alam lainnya. Dalam konteks ini, pemekaran tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga dengan akses dan kontrol terhadap sumber daya tersebut.

Melalui pendekatan teori desentralisasi dan otonomi daerah penulis juga melihat dari aspek ekonomi politik desentralisasi yang mana kontrol sumber daya tidak hanya mencakup ekstraksi mineral, tetapi juga pengembangan sektor pertanian dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi wilayah Sumsel Barat. Sektor pertanian menyerap sekitar 40% tenaga kerja di Indonesia, namun kontribusinya terhadap PDB cenderung menurun karena berkurangnya luasan lahan dan rendahnya pendapatan petani. Elit politik lokal di Sumsel Barat harus mampu merumuskan kebijakan yang dapat membalikkan tren ini jika ingin mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat agraris.

Pengembangan sektor pariwisata di Pagar Alam dan pusat jasa di Lubuklinggau diharapkan dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*)

---

bagi perekonomian regional. Namun, hal ini memerlukan koordinasi yang sinkron antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah (RPJMD). Ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran sering kali menjadi titik lemah dalam tata kelola pemerintahan yang didominasi oleh kepentingan jangka pendek elit.

Sintesis Strategis Rencana Pemekaran Sumsel Barat Analisis mendalam terhadap rencana pemekaran Provinsi Sumatra Selatan Barat melalui Teori desentralisasi dan otonomi daerah menunjukkan bahwa gerakan ini merupakan proyeksi kekuasaan aktor-aktor strategis di tingkat lokal. Peran dominan elit seperti Walikota Lubuklinggau dan Bupati Empat Lawang dalam menyiapkan infrastruktur dan administrasi menegaskan bahwa aspirasi ini memiliki basis institusional yang kuat. Namun, distribusi kekuasaan yang diharapkan masih terganjal oleh moratorium nasional yang mencerminkan kekhawatiran pemerintah pusat atas kegagalan otonomi di banyak daerah.

Kontrol sumber daya mineral dan fiskal menjadi motif ekonomi utama, namun tantangan kemandirian fiskal tetap membayangi keberlanjutan calon provinsi baru ini. Elit lokal harus mampu membuktikan bahwa pemekaran ini bukan sekadar manifestasi dari "syahwat politik" untuk menciptakan jabatan baru, melainkan sebuah langkah nyata untuk mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan rencana Sumsel Barat di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan elit dalam membangun konsensus lintas daerah, menjaga integritas dari praktek neo-feodalisme, dan merespon secara adaptif terhadap dinamika politik nasional di tahun 2025-2026. Proyeksi politik menunjukkan bahwa selama elit lokal mampu menjaga soliditas presidium dan terus memproduksi narasi legitimasi yang kuat, tuntutan pemekaran akan tetap menjadi agenda permanen dalam konstelasi politik Sumatra Selatan.

Namun, tanpa adanya pergeseran dari orientasi kekuasaan ke orientasi pelayanan, provinsi baru ini berisiko terjebak dalam lingkaran setan ketergantungan fiskal dan dominasi oligarki lokal yang justru akan menghambat tujuan mulia dari desentralisasi itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan partisipasi publik dan pengawasan dari kelompok kontra-elit menjadi esensial untuk mengawal proses transformasi wilayah ini agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah Barat Sumatra Selatan.

Dari hasil analisis, terlihat bahwa pengelolaan sumber daya ini menjadi salah satu faktor implisit yang mendorong wacana pemekaran. Dengan terbentuknya provinsi baru, kewenangan pengelolaan sumber daya akan bergeser, atau setidaknya terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baru. Kondisi ini tentu membuka peluang bagi elite lokal untuk memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah pemanfaatan sumber daya ekonomi di wilayahnya. Namun demikian, isu ini jarang disampaikan secara terbuka dalam narasi publik. Sebagian besar argumen tetap dikemas dalam bahasa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terlihat bahwa terdapat lapisan kepentingan yang tidak sepenuhnya muncul di permukaan, tetapi dapat ditangkap melalui analisis yang lebih mendalam terhadap posisi dan kepentingan aktor yang terlibat. Jika dilihat dari sisi kontrol politik, pemekaran wilayah juga berimplikasi pada pembentukan struktur

kekuasaan baru. Provinsi baru berarti hadirnya jabatan-jabatan strategis, seperti gubernur, DPRD provinsi, serta perangkat birokrasi lainnya. Struktur ini tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga menjadi arena baru bagi distribusi kekuasaan politik.

Dalam konteks ini, elite lokal yang saat ini berada di wilayah yang diusulkan memiliki peluang untuk mengisi posisi-posisi strategis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran juga berkaitan dengan upaya membangun dasar kekuasaan baru yang lebih otonom dan tidak sepenuhnya bergantung pada struktur kekuasaan di provinsi induk. Sementara itu, dari sisi pemerintah provinsi, kendali politik yang dimiliki saat ini berpotensi mengalami penyesuaian jika pemekaran benar-benar terjadi. Wilayah kekuasaan yang berkurang secara administratif juga dapat berdampak pada berkurangnya pengaruh politik dan kontrol terhadap sumber daya. Hal ini menjelaskan mengapa respons pemerintah cenderung hati-hati dan lebih banyak tekanan pada aspek regulatif.

Jika dilihat secara keseluruhan, pemekaran Provinsi Sumsel Barat tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan, tetapi juga dengan bagaimana kekuasaan, kebijakan, dan sumber daya dikontrol dan didistribusikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa elite memiliki peran sentral dalam mengarahkan proses pemekaran, baik melalui pembentukan narasi, pengaruh terhadap kebijakan, maupun kontrol terhadap sumber daya strategi. Pemekaran menjadi ruang di mana kepentingan pembangunan dan kepentingan politik saling bertemu. Di satu sisi, terdapat kebutuhan riil masyarakat yang perlu direspons, namun di sisi lain, terdapat dinamika elite yang ikut menentukan bagaimana kebutuhan tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan.

Rencana pemekaran terus didorong oleh tim presidium pemekaran Provinsi Sumsel Barat. Perjuangan untuk memekarkan provinsi baru ini sudah berlangsung cukup lama. Presidium Pemekaran Sumsel Barat di mulai sejak 2016. Yang mana cakupan wilayah yang bakal tergabung dalam Calon Daerah Otonom Baru ini ada 6 Kabupaten/Kota, yang mana 6 Kabupaten/Kota ini ada wilayah yang di mekarkan seperti lahat yang dimekarkan yakni Pagar Alam dan Empat Lawang, Musi Rawas yang dimekarkan menjadi dua wilayah yakni Lubuk Linggau dan Musi Rawas Utara.

Meskipun pemekaran saat ini masih di berlakukan moratorium, semangat tim presidium tidak luntur. Para elite lokal terus melakukan lobi dengan elite partai politik, dan juga elite penguasa saat ini. Dan menariknya dalam temuan di lapangan, baru satu kabupaten yang sudah menyatakan secara resmi untuk bergabung ke lama Calon Daerah Otonom Baru Provinsi Sumsel Barat ini yakni Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan 5 Kabupaten/Kota lainnya belum menyatakan secara resmi, hanya sebatas lisan para pemimpinnya. Ini akan memperkecil kemungkinan wilayah ini lepas. Karena belum adanya dukungan secara resmi dari wilayah tersebut.

Begitupun dengan respon anggota DPD RI Sumatra Selatan komite I. Regulasi pemekaran sumsel Barat ini masih sangat jauh dan juga masih banyak belum mendapatkan persetujuan secara resmi dari wilayah yang bakal tergabung dalam Calon Daerah Otonom Baru Sumsel Barat ini.

Calon Daerah Otonom Baru Sumsel barat yang belum banyak dapat dukungan resmi dari Kabupaten/Kota yang bakal tergabung itu sangat sulit untuk terealisasi. Dukungan resmi untuk bergabung dalam Calon Daerah Otonom Baru Sumsel Barat ini, Kabupaten/Kota tersebut harus melalui tahap Paripurna di DPRD Kabupaten/Kota bersama Kepala Daerahnya. Dalam hal ini baru Kabupaten Empat Lawang yang secara resmi menyatakan dukungannya untuk bergabung dalam Calon Daerah Otonom Baru Sumsel Barat ini. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya baru sebatas lisan kepala daerahnya.

Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, juga memainkan peran krusial sebagai inisiator administratif pertama yang secara resmi menandatangani persetujuan pembentukan Sumsel Barat bersama DPRD setempat (Harian okus, 2023). Dukungan formal ini sangat penting karena memenuhi syarat administratif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pola dukungan ini menunjukkan adanya "syahwat elit lokal" yang dikoordinasikan secara sistematis untuk menciptakan momentum politik

Sumber daya yang terdapat pada beberapa wilayah yang bakal tergabung cukup untuk menompang proses Pembangunan wilayah provinsi baru ini dan bahkan bisa mengalahkan wilayah induk itu sendiri. Lahat yang memiliki cadangan batu bara, Pagar Alam yang jadi tempat objek wisata dan budaya, Lubuk Linggau yang menjadi tempat transit tiga provinsi yakni Bengkulu, Jambi Dan Sumatra Selatan, dan juga Muarataru yang tersimpan cadangan emas. Ini sangat cukup untuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DOB Sumsel Barat ini jika wilayah ini resmi lepas dari wilayah induk. Lalu kenapa nama wilayah ini sumatra selatan barat, kenapa tidak Sumatra Tengah atau Sumatra Timur.

Penulis melihat pemekaran ini memang tidak pernah berdiri di ruang kosong. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat yang menolak. Mereka bahkan menggunakan istilah "raja-raja kecil" untuk menggambarkan potensi dampak terbentuknya daerah otonomi baru. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Ada anggapan bahwa pemekaran justru membuka ruang bagi elite-elite baru untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di wilayah yang lebih sempit, dengan kontrol yang relatif lebih mudah. Dalam logika ini, narasi pemerataan pembangunan sering kali dianggap hanya sebagai kemasan semacam justifikasi normatif yang digunakan untuk memperkuat legitimasi politik dari rencana pemekaran tersebut.

Namun, pandangan itu tidak sepenuhnya diterima oleh semua pihak. Ada juga yang mencoba melihatnya dari sudut yang berbeda. Terlihat adanya upaya untuk menempatkan pemekaran dalam kerangka yang lebih administratif dan teknokratis. Salah satu tokoh masyarakat sumsel yang penulis temui, secara tegas tidak sepakat dengan anggapan bahwa daerah otonomi baru otomatis akan melahirkan "raja-raja kecil". Bagi dia, persoalannya bukan di situ. Justru yang lebih penting adalah bagaimana pemekaran bisa memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendorong pemerataan pembangunan yang lebih konkret.

Menariknya, dalam penjelasannya, ia juga menyentuh aspek kapasitas ekonomi daerah. Ia memberikan contoh beberapa wilayah seperti Lahat, PALL, Muara Enim, hingga Lubuklinggau, yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda

---

terutama antara daerah yang kaya sumber daya alam dan kota yang lebih bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari sini terlihat bahwa pemekaran tidak bisa hanya dilihat dari jumlah wilayah administratif yang memenuhi syarat teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan daya dukung ekonomi dan potensi fiskal masing-masing daerah. Bahkan ia sendiri berpikir, apakah secara realistis sebuah provinsi baru bisa langsung menjadi “kaya” hanya karena kombinasi wilayah tersebut.

Penulis mendalami, pertama terdapat kecenderungan framing yang berupaya mengalihkan diskursus dari isu politik (elite capture atau “raja-raja kecil”) ke isu administratif dan efisiensi pemerintahan. Ini bisa dilihat sebagai legitimasi strategi, di mana pemekaran diposisikan sebagai kebutuhan teknokratis, bukan proyek politik. Kedua, meskipun secara eksplisit menolak narasi negatif tentang elite lokal, pernyataan tersebut secara implisit justru mengakui kompleksitas ekonomi daerah yang akan dimekarkan. Artinya, ada pengakuan bahwa keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan struktural baik dari sisi fiskal, infrastruktur, maupun kelembagaan.

Ketiga, pernyataan ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara idealitas (pemerataan dan efektivitas pelayanan) dengan realitas politik-ekonomi di tingkat lokal. Pemekaran memang berpotensi memperpendek rentang kendali, namun tanpa mekanisme kontrol yang kuat, ia juga tetap membuka peluang bagi reproduksi kekuasaan elit di tingkat lokal. Dengan kata lain, memuat tentang “raja-raja kecil” sebenarnya tidak sepenuhnya gugur ia hanya mengubah bentuknya, dari kekhawatiran normatif menjadi tantangan struktural yang perlu diantisipasi dalam desain kebijakan pemekaran itu sendiri.

### ***Faktor-Faktor Yang Mendorong Usulan Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Barat***

Pemekaran wilayah di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang berakar pada semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang dimulai sejak era Reformasi. Dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan, wacana pembentukan Provinsi Sumatera Selatan Barat (Sumsel Barat) telah bertransformasi dari sekadar aspirasi politik menjadi sebuah kebutuhan struktural yang didorong oleh fakta objektif di lapangan. Secara geografis, Sumatera Selatan merupakan entitas yang sangat luas, dengan koordinat astronomis antara 1°-4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur Timur, mencakup total luas wilayah mencapai 86.771,68 km<sup>2</sup>. Luasnya bentang alam ini, yang mencakup pegunungan, dataran tinggi, hingga rawa di pesisir, menciptakan tantangan administratif yang sangat kompleks bagi pemerintah provinsi yang berpusat di Kota Palembang.

Narasi besar mengenai pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Sumsel Barat pada dasarnya merupakan respons kolektif terhadap keterbatasan jangkauan pelayanan publik, kesenjangan ekonomi yang persisten antara wilayah timur dan barat, serta keinginan kuat untuk melestarikan identitas kultural yang unik dari masyarakat Basemah, Semende, dan Lematang. Dorongan pemekaran Calon Daerah Otonom Baru Sumsel Barat di latarbelakangi beberapa faktor, diantaranya:

a. Luasnya wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan

Faktor utama yang melatarbelakangi dorongan pemekaran adalah besarnya wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan yang menyebabkan distribusi pelayanan publik di daerah barat menjadi relatif kurang optimal. Dalam perspektif administrasi publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung pada "rentang kendali" (span of control).

Jarak fisik yang ekstrem antara pusat pemerintahan provinsi di Palembang dengan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah barat seperti Lubuklinggau, Pagar Alam, dan Musi Rawas menciptakan hambatan logistik, waktu, dan biaya yang signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan data spasial, wilayah barat Sumatera Selatan merupakan daerah yang secara geografis berada di kaki pegunungan Bukit Barisan. Jarak tempuh darat dari Palembang menuju Kota Lubuklinggau mencapai 317 kilometer dengan waktu tempuh rata-rata 7 hingga 8 jam dalam kondisi normal.

Untuk mencapai titik terjauh seperti Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), jaraknya membentang hingga 379 kilometer dengan waktu tempuh yang bisa melampaui 9 jam. Kondisi ini menyebabkan pelayanan birokrasi yang bersifat provinsi seperti pengurusan perizinan pertambangan, koordinasi kesehatan rujukan tingkat lanjut, hingga urusan kepegawaian bagi aparatur sipil negara di daerah menjadi sangat lamban dan tidak efisien. Kesenjangan Pembangunan

Kesenjangan pembangunan antara wilayah timur yang terpusat di Palembang dan sekitarnya dengan wilayah barat merupakan pendorong kedua bagi tuntutan pemerataan ekonomi. Sumatera Selatan secara makro menunjukkan performa ekonomi yang impresif dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp663,96 triliun pada tahun 2024 dan PDRB per kapita sebesar Rp75,13 juta.

Struktur PDRB Sumatera Selatan masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, pertambangan dan penggalian (21,68% - 22,90%), industri pengolahan (17,84%), serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (16,11%). Wilayah barat, khususnya Lahat dan Musi Rawas, merupakan kontributor utama bagi sektor pertambangan melalui cadangan batubara dan gas alamnya. Namun, konsentrasi infrastruktur industri pengolahan dan pusat jasa perdagangan tetap berada di wilayah metropolitan Palembang.

Hal ini menciptakan fenomena ketimpangan wilayah di mana daerah penyumbang sumber daya alam (SDA) justru seringkali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan pusat pemerintahan. Analisis terhadap data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan korelasi yang nyata antara akses ekonomi dan kualitas hidup. Pada tahun 2022, IPM Sumatera Selatan meningkat sebesar 0,62 poin, namun distribusi peningkatan ini tidak merata di seluruh kabupaten/kota. Terdapat ketimpangan yang cukup besar karena sebagian besar wilayah di luar pusat kota berada pada tingkat ekonomi rendah, sementara hanya sedikit daerah yang memiliki PDRB per kapita sangat tinggi. Ketidakmerataan ekonomi antar wilayah di Sumatera Selatan ini menunjukkan bahwa model pembangunan yang tersentralisasi di satu titik (Palembang) telah mencapai titik jenuh dan memerlukan rekayasa otonomi baru untuk memecah pusat-pusat pertumbuhan.

---

Ketergantungan ekonomi Sumatera Selatan pada sumber daya alam menjadikannya rentan terhadap fluktuasi pasar global, sebagaimana terjadi pada tahun 2020 di mana pertumbuhan PDRB sempat menyentuh angka negatif -0,11 persen akibat pandemi. Krisis tersebut memberikan dampak yang lebih berat pada wilayah-wilayah di pedalaman barat yang tidak memiliki diversifikasi ekonomi sekuat wilayah Palembang. Hal ini memperkuat argumen bahwa otonomi provinsi baru akan memungkinkan wilayah barat untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih spesifik, seperti hilirisasi produk pertanian dan perkebunan, guna mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif mentah.

b. Potensi sumber daya alam

Aspirasi pembentukan Provinsi Sumsel Barat didukung secara kuat oleh fakta bahwa wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, yang jika dikelola secara mandiri, akan mampu menjamin keberlangsungan fiskal daerah tersebut. Calon provinsi ini mencakup beberapa daerah dengan cadangan energi terbesar di Indonesia.

a) Kekayaan Sektor Pertambangan dan Energi

Sumatera Selatan memiliki cadangan batubara sebesar 18,13 miliar ton, di mana lokasi utamanya berada di Kabupaten Muara Enim, Lahat, dan Musi Rawas. Mutu batubara di wilayah ini umumnya berjenis lignit dengan kandungan kalori antara 4800-5400 Kcal/kg. Dari total cadangan tersebut, masih terdapat sekitar 13,07 miliar ton yang belum dikelola sama sekali. Selain batubara, potensi gas alam di Musi Rawas dan Lahat mencapai angka 7.238 BSCF. Kekayaan mineral ini merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sangat besar bagi calon provinsi baru.

Energi fosil ini tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai modal dasar bagi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan industri hilir seperti produk plastik dan pupuk di wilayah barat. 1 Selama ini, kendala birokrasi di tingkat provinsi induk seringkali menghambat percepatan investasi di sektor energi di wilayah barat karena proses perizinan dan koordinasi yang tersentralisasi.

b) Sektor Perkebunan dan Pertanian

Wilayah barat Sumatera Selatan merupakan episentrum komoditas perkebunan, khususnya kopi, karet, dan kakao. Kabupaten Lahat tercatat memiliki rata-rata produksi kakao terbesar mencapai 2.227 ton per tahun. Sementara itu, Kota Pagar Alam dan Lahat merupakan wilayah dengan elevasi tinggi yang sangat cocok untuk perkebunan kopi kualitas unggul. Sumatera Selatan sendiri merupakan provinsi dengan luas perkebunan karet terbesar di Indonesia, mencapai 883,3 ribu hektar atau setara dengan 25% dari total luas nasional. Masyarakat di wilayah Semende dan Pagar Alam memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan lahan pertanian.

Di Kota Lubuklinggau, 66,5 persen wilayahnya merupakan dataran rendah yang subur dengan jenis tanah aluvial dan regosol yang sangat cocok untuk padi sawah dan palawija. Namun, potensi besar ini seringkali terhambat oleh kurangnya infrastruktur pengolahan di tingkat lokal. Dengan adanya provinsi baru, fokus pembangunan dapat diarahkan pada rehabilitasi sarana irigasi, pengembangan alat mesin pertanian (alsintan), dan pembangunan industri pengolahan karet dan kopi

---

di wilayah barat, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dibandingkan sektor industri di sekitar Palembang.

### *Identitas kultural*

hal lain yang menjadi dasar argumen pemekaran adalah identitas kultural yang unik dari masyarakat di dataran tinggi Sumatera Selatan. Masyarakat Basemah (Pasemah), Semende, dan Lematang memiliki karakteristik sosial budaya tersendiri yang memperkuat argumen perlunya otonomi provinsi baru sebagai upaya pelestarian budaya lokal. Wilayah barat bukan sekadar unit administratif, melainkan sebuah ruang budaya yang telah ada selama ribuan tahun, terbukti dengan keberadaan situs-situs megalitikum yang tersebar di Lahat dan Pagar Alam.

a. Sistem Kekerabatan Tunggu Tubang pada Suku Semende

Salah satu keunikan sosiologis yang paling menonjol di wilayah ini adalah sistem adat "Tunggu Tubang" pada masyarakat Semende. Dalam sistem ini, anak perempuan tertua memegang peranan krusial sebagai penjaga harta pusaka keluarga, termasuk rumah adat dan lahan pertanian. Tradisi ini mencerminkan kedaulatan perempuan dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi keluarga. Masyarakat Semende memiliki pandangan hidup yang sangat harmonis dengan alam, di mana mereka memiliki kalender musim sendiri untuk bertanam kopi dan padi tanpa perlu terlalu banyak intervensi aturan dari pusat yang seringkali tidak relevan dengan kearifan lokal.

b. Harmoni dengan Alam dan Pelestarian Megalitikum

Masyarakat suku Basemah di wilayah Pagar Alam dan sekitarnya telah hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad. Mereka menjaga hutan, mata air, dan sungai melalui hukum adat yang ketat. Situs-situs megalitikum yang ditemukan seringkali berada di dekat kawasan hutan larangan, menunjukkan bahwa leluhur masyarakat Basemah telah mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan pelestarian lingkungan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, peran komunitas adat mulai terkikis akibat desentralisasi yang belum sepenuhnya menyentuh ranah pengakuan hak ulayat. Hilangnya peran komunitas adat ini telah berdampak pada meningkatnya bencana ekologis seperti banjir bandang di Sungai Lematang yang memiliki panjang 244 kilometer dan berhulu di permukiman suku Basemah. Otonomi provinsi baru dipandang sebagai instrumen untuk menghidupkan kembali hukum adat dan memperkuat peran lembaga adat dalam pengambilan kebijakan publik. Pelestarian tradisi seperti "Ngayikka Dakecik" (ritual pembersihan diri sebelum khitan bagi anak perempuan) dan upacara "Bakayekan" pada suku Pasemah merupakan bagian dari upaya menjaga moralitas dan etika sosial masyarakat lokal di tengah gempuran globalisasi. Tanpa adanya entitas politik setingkat provinsi yang secara khusus mengayomi identitas ini, dikhawatirkan keunikan budaya dataran tinggi Sumatera Selatan akan perlahan memudar dan tertutup oleh budaya metropolitan yang lebih dominan.

### *Tingkat Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Sumatra Selatan*

Ujung tombak dari setiap kebijakan pemekaran wilayah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, terdapat variasi yang cukup lebar dalam profil

kesejahteraan antar kabupaten di wilayah barat Sumatera Selatan. Sebagai contoh, tingkat kemiskinan di Kabupaten Empat Lawang sempat mengalami kenaikan sebesar 0,33 persen pada tahun 2022 akibat dampak pandemi Covid-19, meskipun secara historis menunjukkan tren penurunan sejak 2015.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan berada pada kisaran 3-5%, yang menunjukkan kondisi relatif merata namun tetap memerlukan penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi industri di wilayah barat. Terdapat korelasi kuat (koefisien -0.694) antara IPM dengan tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah barat akan secara langsung menurunkan angka kemiskinan. Permasalahan kesehatan seperti stunting juga masih menjadi fokus utama.

Kurangnya aktivitas fisik pada remaja (64,4% kurang aktivitas pada usia 10-14 tahun) dan risiko penyakit lainnya menunjukkan perlunya fasilitas kesehatan rujukan yang lebih dekat. Saat ini, rujukan medis dari Empat Lawang atau Muratara harus menempuh perjalanan darat berjam-jam menuju Palembang, yang seringkali memperburuk kondisi pasien. Keberadaan provinsi baru akan memungkinkan pembangunan rumah sakit rujukan kelas A di wilayah barat (misalnya di Lubuklinggau) yang mampu melayani masyarakat tanpa harus bergantung pada fasilitas di ibukota provinsi induk.

## SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa usulan pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Barat merupakan proyeksi kekuasaan yang sangat kuat dari para elit politik di tingkat lokal. Para aktor utama seperti Walikota Lubuklinggau dan Bupati Empat Lawang bertindak sebagai penggerak utama yang mengonsolidasikan dukungan melalui pembentukan presidium. Elit politik lokal ini menggunakan narasi ketimpangan pembangunan dan buruknya pelayanan publik di wilayah barat sebagai alat legitimasi untuk menarik simpati massa. Dalam perspektif politik, wacana ini merupakan upaya "framing" strategis di mana isu pembangunan yang bersifat teknokratis dibungkus dengan kepentingan politik untuk menciptakan struktur kekuasaan baru yang lebih otonom dari provinsi induk. Faktor geografis menjadi basis argumen teknis yang paling tak terbantahkan dalam usulan pemekaran ini. Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah mencapai 86.771,68 km<sup>2</sup> telah mencapai titik jenuh dalam koordinasi administratif yang tersentralisasi di Palembang. Jarak fisik yang ekstrem antara pusat pemerintahan provinsi dengan kabupaten/kota di wilayah barat menciptakan inefisiensi yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wilayah calon Provinsi Sumsel Barat memiliki basis ekonomi yang sangat kuat, terutama didorong oleh sektor ekstraktif dan perkebunan. Ketersediaan sumber daya alam seperti batubara di Lahat (cadangan 18,13 miliar ton), emas di Muratara, serta sektor pariwisata di Pagar Alam memberikan optimisme terhadap kapasitas fiskal daerah di masa depan. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah ini masih sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global, yang dapat mengancam stabilitas fiskal jika tidak dikelola dengan

---

diversifikasi ekonomi yang tepat. Hingga tahun 2026, rencana pemekaran Sumsel Barat masih terganjal oleh kebijakan moratorium nasional yang belum dicabut oleh pemerintah pusat. Meskipun UU No. 23 Tahun 2014 telah memberikan kerangka baru melalui mekanisme "Daerah Persiapan" selama 3 hingga 5 tahun, pemerintah pusat tetap memprioritaskan efisiensi anggaran dan stabilitas nasional pasca-pemilu. Peneliti menemukan bahwa kesiapan administratif di tingkat lokal masih belum seragam. Baru Kabupaten Empat Lawang yang secara resmi memberikan dukungan tertulis melalui sidang paripurna DPRD, sementara lima kabupaten/kota lainnya baru memberikan komitmen lisan dari para kepala daerahnya.

### DAFTAR RUJUKAN

- Ananda, R. (2021). Desentralisasi dan Dinamika Pemekaran Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 145-160.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. (2020). *Evaluasi Pemekaran Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kemendagri.
- BPS, B.P.S. (2025). *Provinsi Sumatra Selatan Dalam Angka 2025, Sumatra Selatan Province in Figures*. Volume 43.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Easton, D. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. New York: Alfred A. Knopf.
- Fitria, M., & Darmawan, B. (2022). Ketimpangan Pembangunan Sumatra Selatan: Tantangan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 10(1), 55-68.
- Haris, S. (Ed.). (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: Desentralisasi, demokratisasi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Didi Indawan. (2023, 17 Januari). Empat Lawang Kabupaten Pertama Dukung Pembentukan Sumsel Barat, Lubuklinggau Siap Jadi Ibu Kota. [HARIANOKUS.COM](https://okuselatan.disway.id/sumsel/read/639869/empat-lawang-kabupaten-pertama-dukung-pembentukan-sumsel-barat-lubuklinggau-siap-jadi-ibu-kota).  
<https://okuselatan.disway.id/sumsel/read/639869/empat-lawang-kabupaten-pertama-dukung-pembentukan-sumsel-barat-lubuklinggau-siap-jadi-ibu-kota>.
- Kun Budianto, & Badarudin Azarkasyi. (2024). Community Outreach Gaps in Drafting Regional Regulations: A Call for enhanced Government Socialization. *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, Volume 24 No 1.
- Mosca, G. (1939). *The ruling class*. New York: McGraw-Hill.
- Muhsin, D., Robo, S., & Pawane, A. R. (2021). Political Motives for the Plan for the Expansion of New Autonomous Regions in Papua. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 3(2), 221-238. <https://doi.org/10.15575/politicon.v3i2.13114>
- Pahlevi Reiza. 2025. 9 Daerah Sumsel Masuk Usulan Daerah Otonomi Baru, 1 Provinsi-8 Kabupaten/Kota. *DetikSumbagsel*, 9 Juli 2025. Diakses pada 25 September 2025 pukul 21:16 Wib, dari

<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8003925/9-daerah-sumsel-masuk-usulan-daerah-otonomi-baru-1-provinsi-8-kabupaten-kota>.

Parhan, A. (2024). Miliki sejarah paling sering dimekarkan, Provinsi Sumatera Selatan tercatat telah membentuk 3 DOB. Pikiran Rakyat Garut. Diakses dari <https://garut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-528374246/miliki-sejarah-paling-sering-dimekarkan-provinsi-sumatera-selatan-tercatat-telah-membentuk-3-dob?page=all>.

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. (2025). Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran 2024.

Riyadi, S. (2020). Otonomi Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 1-15.

Situmorang, J. (2020). Dampak Pemekaran Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Politik Lokal*, 7(2), 89-104.

Wibowo, C. (2023). Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia. INDOCAMP.

Yuliani, R. (2023). Identitas Kultural dan Politik Lokal di Sumatra Selatan Barat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(3), 215-229.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.

Bab VI Penataan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.